

Syafruddin Prawiranegara and PDRI in the Dynamics of the History of the Republic: A Historical Review of the Continuation of Indonesian Sovereignty After the Second Dutch Military Aggression

Ikbal Husni
Sekolah Tinggi Agama Islam Barus
✉ husnikbal@gmail.com

Abstract

This paper aims to historically examine the crucial role of Syafruddin Prawiranegara in the formation and leadership of the Emergency Government of the Republic of Indonesia (PDRI) as a response to the vacuum of central government due to the Second Dutch Military Aggression in 1948. PDRI became the mainstay of the legality and existence of the Republic of Indonesia amidst the systematic efforts of the Dutch to paralyze the national government structure. Through a historical approach with a literature study of official documents, state archives, and relevant literature, this paper describes the political and military context at that time and Syafruddin's strategic actions in maintaining the continuity of state sovereignty. This study also places Syafruddin in the post-independence ideological landscape. The results emphasize that without the initiative and legitimacy of PDRI, the existence of the Republic of Indonesia is very likely to lose its political footing in the international arena. Therefore, Syafruddin's position deserves to be reviewed in the narrative of the Indonesian presidency and the history of state resilience.

Keywords: Syafruddin Prawiranegara, PDRI, Second Dutch Military Aggression, Indonesian history, state legitimacy, and nationalism

Syafruddin Prawiranegara dan PDRI Dalam Dinamika Sejarah Republik: Telaah Historis Atas Keberlangsungan Kedaulatan Indonesia Pasca Agresi Militer Belanda II

Abstrak

Penulisan ini bertujuan untuk mengkaji secara historis peran krusial Syafruddin Prawiranegara dalam pembentukan dan kepemimpinan Pemerintahan Darurat Republik Indonesia (PDRI) sebagai respons terhadap kekosongan pemerintahan pusat akibat Agresi Militer Belanda II tahun 1948. PDRI menjadi penopang legalitas dan eksistensi Republik Indonesia di tengah upaya sistematis Belanda untuk melumpuhkan struktur pemerintahan nasional. Melalui pendekatan historis dengan studi pustaka terhadap dokumen resmi, arsip negara, serta literatur relevan, tulisan ini menggambarkan konteks politik dan militer saat itu serta tindakan strategis Syafruddin dalam menjaga kesinambungan kedaulatan negara. Kajian ini juga menempatkan Syafruddin dalam lanskap ideologis pasca-kemerdekaan. Hasilnya menegaskan bahwa tanpa inisiatif dan legitimasi PDRI, eksistensi Republik Indonesia sangat mungkin kehilangan pijakan politiknya dalam kancah internasional. Oleh karena itu, posisi Syafruddin layak ditinjau ulang dalam narasi kepresidenan Indonesia serta sejarah ketahanan negara.

Kata Kunci: Syafruddin Prawiranegara, PDRI, Agresi Militer Belanda II, sejarah Indonesia, legitimasi negara, dan nasionalisme

Pendahuluan

Setelah Indonesia merdeka pada 17 Agustus 1945, kemerdekaan yang telah direbut ini bukan merupakan akhir bagi Indonesia untuk terlepas dari cengkeraman Belanda, salah satu peristiwa masa lampau tentang kesejarahan Indonesia adalah pemindahan pusat ibu kota pemerintahan yang dilakukan oleh Syafruddin Prawiranegara ke Bukit Tinggi dalam hal mengantisipasi akan Agresi II yang dilakukan oleh Belanda sehingga peristiwa itu dikenang dengan nama Pemerintah Darurat Republik Indonesia atau sering disingkat dengan (PDRI).

Presiden adalah sebuah sebutan pimpinan tertinggi dalam pemerintahan atau negara yang menganut sistem pemerintahan presidensial, di negara Indonesia presiden sebagai kepala negara sekaligus kepala pemerintahan dan sebagai kepala pemerintahan, presiden dibantu oleh wakil dan menteri-menterinya dalam kabinet (Siagian et al., 2022), dalam sistem presidensial di Indonesia, presiden menjabat selama 5 tahun dan dapat dipilih sekali lagi setelah selesai menjabat dengan melaksanakan pemilihan umum atau yang biasa disebut dengan pilkada (MPR RI, 2020).

Table 1 Perbedaan Masa Jabatan Presiden: Orde Lama, Orde Baru, Reformasi

Era	Ketentuan Masa Jabatan	Mekanisme Pemilihan	Landasan Hukum	Catatan
Orde Lama (1945 - 1966)	Tidak diatur secara tegas (UUD 1945 sebelum amandemen tidak membatasi jumlah periode)	Dipilih oleh MPR (bukan pemilu langsung)	UUD 1945 asli	Presiden Soekarno menjabat tanpa batasan periode
Orde Baru (1966 - 1998)	Tanpa batas masa jabatan secara eksplisit (presiden bisa menjabat lebih dari	Dipilih oleh MPR	UUD 1945 (non-amandemen)	Soeharto menjabat 6 kali (32 tahun)

	dua periode)			
Reformasi (1999 - sekarang)	Maksimal 2 periode (5 tahun kali 2)	Pemilu langsung oleh rakyat	UUD 1945 Amandemen I (1999) & UU No. 7 Tahun 2017	Diterapkan sejak Pemilu Presiden 2004

Narasi dan fakta Sejarah negara kita selama ini pada setiap periode pemerintahan selalu ditunjukkan dengan kejatuhan presiden yang sudah memerintah seperti Soekarno, Soeharto, Habibie, dan Abdurrahman Wahid atau yang populer dengan nama Gusdur, kecuali presiden setelah pemerintahan Gusdur, semua presiden berakhir secara normal yaitu masa jabatan yang telah habis (Dian Aries Mujiburohman, 2013).

Dalam tonggak sejarah Indonesia sebenarnya kalau kita kulik atau lihat lebih jauh kedalam, presiden yang pernah memimpin Indonesia itu bukan hanya Soekarno, Soeharto, Habibie, Megawati, Susilo Bambang Yudhoyono, Jokowi dan Prabowo sekarang, ternyata ada 2 orang lagi yang jarang disebutkan dalam narasi sejarah. Karena mereka menjadi penganti sah sementara presiden yaitu Syafruddin Prawiranegara (1 Desember 1948-13 Juli 1949) dan Mr Assat (27 Desember 1949 hingga 15 Agustus 1950) (Tempo, 2023).

Kendati demikian kasus antara Syafruddin Prawiranegara dan Mr. Assat berbeda, karena Syafruddin Prawiranegara ditugaskan untuk membentuk Pemerintah Darurat Republik Indonesia saat itu karena ada agresi militer yang dilakukan oleh Belanda yang mengakibatkan ditangkapnya presiden Soekarno dan Mohammad Hatta dan separuh kabinet mereka, yang kemudian presiden Soekarno dan wakilnya diasingkan ke pulau Bangka.

Sedangkan Mr. Asaat ditunjuk sebagai pemangku pejabat saat itu, karena perubahan struktur negara menjadi RIS (Republik Indonesia Serikat) dan adanya kekosongan jabatan Presiden RI di Yogyakarta Presiden dan wakil Presiden

berhalangan hadir dalam segala sesuatu hal maka semua tanggung jawab dipegang oleh ketua BP-KNIP (Badan Pekerja Komite Nasional Indonesia Pusat), yang memang pada tahun 1949 yang menjadi ketua adalah Mr Assat (Puspasari Setyaningrum, 2023).

Pembentukan PDRI sebagai solusi darurat atas apa yang telah dilakukan oleh Belanda terhadap negara Indonesia yang menyerang kota-kota besar di Indonesia yang membuat Indonesia mengalami kerapuhan, hal ini karena dimasa itu Indonesia diibaratkan seperti bayi yang baru mulai merangkak, dengan kondisi yang masih serba kekurangan, baik dari alteri senjata dan pangan, tentu hal yang tidak menentu ini membuat masyarakat sipil menjadi bingung dan gundah.(Dr Nopriansyah, n.d.)

Dengan dimandatnya Syafruddin Prawiranegara untuk membuat Pemerintahan Darurat Republik Indonesia sangat penting untuk dikaji kembali sehingga merawat memori yang mulai usang dimata sejarah Indonesia dari itu penulis ingin mengkaji lebih jauh tentang Syafruddin Prawiranegara dalam PDRI ini dengan mengusung tema penulisan "Syafruddin Prawiranegara dan PDRI Dalam Dinamika Sejarah Republik: Telaah Historis Atas Keberlangsungan Kedaulatan Indonesia Pasca Agresi Militer Belanda II.

Metode Penelitian

Pendekatan historis merupakan metode utama yang digunakan dalam kajian ini untuk menelusuri dan menganalisis peristiwa masa lalu secara kronologis dan kritis. Dalam hal ini, pendekatan historis dilakukan melalui studi terhadap dokumen resmi, arsip negara, serta sumber-sumber primer dan sekunder yang relevan dengan pembentukan dan peran Pemerintahan Darurat Republik Indonesia (PDRI) serta tokoh sentralnya, Syafruddin Prawiranegara.

Untuk melengkapi data penulis menggunakan pendekatan studi Pustaka,

Metode penelitian pustaka adalah metode teknik penelitian yang dilakukan dengan cara mengumpulkan data dan informasi melalui berbagai literatur tertulis seperti buku, jurnal ilmiah, artikel, dokumen, dan karya ilmiah lainnya yang relevan dengan topik penelitian (Mestika Zed, 2004). Tujuannya adalah untuk mengembangkan kerangka teori, memperkuat argumen, dan menemukan landasan konseptual atas permasalahan yang dikaji.

Metode ini tidak melibatkan pengumpulan data dari lapangan secara langsung, melainkan fokus pada pengkajian kritis terhadap gagasan atau temuan yang telah dipublikasikan sebelumnya (Nazir, 2005). Penelitian pustaka sering digunakan sebagai pendekatan awal dalam penelitian ilmiah, atau sebagai metode utama dalam kajian filosofis, historis, atau normative (George, 2008).

Pembahasan

Secara umum perjuangan pergerakan Indonesia dibagi menjadi 2 bentuk yaitu perjuangan Nasionalisme No Agama dan Nasionalisme Agama Islam, yang rincinya ada juga yang memilih untuk bekerja sama dengan penjajah "golongan kooperator" terhadap kolonialisme. Setelah itu dilihat lebih jauh ada empat tipe pemikir-pemikir awal Indonesia yaitu tipe yang pertama adalah tipe yang mengakui kebenaran ajaran islam dan hidup sebagai muslim yang taat, namun tidak percaya akan kepada organisasi islam, tipe yang ke dua secara formal memeluk islam namun tidak mempunyai kesadaran akan jiwa islam, yang kehidupan, kesadaran dan jiwanya adalah humanisme seperti barat, yang ke tiga orang-orang yang meninggalkan keyakinannya baik itu Islam, Kristen, Hindu, Buddha, dan agama lainnya dan terang terangan mengatakan dirinya seorang komunisme, serta memusuhi semua agama yang ada di Indonesia, serta yang ke 4 adalah kebalikan dari tidak sebelumnya yaitu golongan tipe yang

memegang teguh akan ajaran agamanya serta percaya akan organisasi politik islam serta mempunyai keahlian dalam suatu ilmu modern dan tidak pernah melepaskannya dari sudut pandang keislaman.

Syafruddin Prawiranegara, lahir di Banten tepatnya di Anyer Kidul pada tanggal 28 Februari tahun 1911, dari pasangan Arsyad Prawiraatmadja dan Noeraini yang kedua orang tuanya berdarah Banten dan Minangkabau (Akmal Nasery Basral, 2011), dan masa kecilnya dipanggil "Kuding", sebagai anak yang berdarah Banten dan Minang tentu Syafruddin Prawiranegara seorang yang taat akan agama dan itu senada dengan pepatah Minang "adat bersandi syara' dan syara' bersandi kitabullah", beliau merupakan tokoh yang sangat berperan dalam proses agresi militer yang dilakukan oleh Belanda, dan negarawan yang banyak memainkan peran penting dalam proses kemerdekaan dan tata-tatan kenegaraan ini.

Berbeda dengan tokoh muslimin Indonesia yang lain, beliau tidak pernah mengenyam pendidikan islam secara khusus, namun beliau belajar membaca Al-Qur'an di rumah saudara orang tuanya di Banten (Muhammad Mansur, 2017) lalu Syafruddin Prawiranegara menempuh pendidikan ELS (Europeesche Lagere School) di Serang Banten pada tahun 1925, lalu pada tahun 1928 beliau melanjutkan sekolahnya di Meeer Ulitgebroid Lage Onderwijs (MULO) di Madiun, lalu pada tahun 1931 di Bandung beliau melanjutkan pendidikan di Algemeene Middelbare Scholl (AMS)(William Ciputra, 2022). Pendidikan akademik yang beliau tempuh adalah Master In De Rechten di RHS (Rechts Hoge Scholl/Sekolah Tinggi Hukum) di Jakarta (Muhammad Mansur, 2017).

Syafruddin menikah dengan Tengku Halimah Syehabuddin yang sehari-hari dipanggil dengan Lily anak dari Radja Sahaboeddin yang merupakan seorang Camat Buabatu Bandung. Dari

pernikahannya ini Syafruddin dan Liliy dikaruniai delapan orang anak yang terdiri atas empat orang laki-laki dan empat orang perempuan. Anak pertama bernama Aisyah, Salvyah, Chalid, Farid, Chalidah, Faridah, Rasyid, dan Yazid (Aji Rosidi, 2011), dimasa tuanya Syafruddin memilih untuk tidak terlibat lagi dalam dunia pemerintahan dan politik beliau lebih memilih untuk menjadi seorang mubaligh atau da'i kemudian beliau meninggal di Jakarta pada tanggal 15 Februari 1989.

Pada tahun tahun 1939-1940 beliau sempat menjadi redaktur Soeara Timur sebuah surat kabar yang di sponsori oleh Soetardjo Kartohadikusumo (seorang anggota Volkasraad dan seorang penulis petisi terkenal di Pemerintahan Hindia Belanda pada tahun 1936) (George McT. Kahin, 2016).

Semenjak proklamasi dinyatakan pada tanggal 17 Agustus 1945, Syafrudin Prawiranegara memang sudah nampak dari awal, itu terbukti bahwa Syafruddin diangkat menjadi anggota Badan pekerja KNIP (Komite Nasional Indonesia Pusat) yang tugasnya sebagai badan legislatif sebelum terbentuknya MPR dan DPR di Indonesia (Sungkar Pratama, 2019). Namanya semakin melesat disaat negeri ini mulai berjaang dalam mempertahankan kemerdekaan dan keberlangsungannya, sebagai Menteri keuangan dalam 3 kabinet yang berbeda, Gubernur Bank Indonesia, beliau jungkir balik dalam membenahi perekonomian Indonesia, dalam hal ini kebijakannya yang paling penting adalah membuat Oeang Repoeblik Indonesia (ORI) pada Bulan Oktober 1946 sebagai alat tukar pengganti uang Jepang dan Belanda (Floriberta Aning, 2005).

Namun setelah dikeluarkannya maklumat presiden yang mengumumkan pembentukan partai-partai sebagai pendukung pemerintah, maka setiap anggota KPNI diharuskan untuk masuk partai, maka pada saat itu ada 3 Partai besar yaitu PNI (Partai Nasionalis Indonesia), Partai

Sosialis, dan Masjumi (Majelis Syuro Muslimin Indonesia), memang ada pergolakan batin yang terjadi dalam hati Syafruddin Prawiranegara karena bila dia memilih partai sosialis maka dia telah mengkhianati ayahnya yang telah menanamkan iman dan Islam semenjak kecil, maka beliau memilih partai Masyumi sebagai pelabuhan hatinya walaupun pemikirannya yang sedikit sosialis, lebih jauh antara Syafruddin Prawiranegara dan Sultan Syahril yang merupakan sahabat dekat yang sama-sama anti fasisme serta sangat menjunjung tinggi paham humanisme, diantara keduanya berbeda orientasinya, Sultan Syahril seorang muslim sekuler yang apresiatif terhadap sosialisme demokrasi sehingga mendirikan Partai Rakyat Sosialis (PARAS) yang kemudian hari bertransformasi menjadi Partai Sosialis Indonesia (PSI), sedangkan Syafruddin Prawiranegara seperti penjelasan di atas dia berlabuh kepada partai Masyumi sebagai seseorang yang bersimpati kepada Sosialisme Religius (Mustafa & M. Anwar Syi'aruddin, 2020), dan jika dilihat lebih jauh memang dalam pertemuan ideologi pemerintahan Indonesia ini sejak awal sudah terlihat antara Islam, sosialis, dan nasionalis, sehingga itu tampak sampai sekarang.

Sebagai anak yang hidup dalam ketaatan agama, tidak lantas membuat Syafruddin Prawiranegara terbawa arus dalam keadaan saat itu yang saat populer akan buku-buku sosialis dan komunis, beliau juga membaca buku karya Karl Marx yang berjudul Das Kapital dalam bahasa Jerman, baginya membaca buku-buku seperti itu tidak lah akan menimbulkan guncangan akan kepercayaan agamanya yang telah dianutnya dari kecil (Ajip Rosidi, 2011).

Ini adalah fakta bahwa menunjukkan betapa berkelasnya seorang Syafruddin Prawiranegara sebagai seorang tokoh yang religius ditopang dengan ilmu umum, dan bila seseorang telah dibekali ilmu agama

dulu sehingga ilmu yang lain yang masuk tidak mampu mengoyahkan imam yang telah kuat dalam sanubari hati.

Banyak dari masyarakat tidak tahu akan adanya peristiwa PDRI (Pemerintahan Darurat Republik Indonesia) padahal peristiwa ini menjadi peristiwa paling bersejarah di Indonesia, hal ini disebabkan pada masa Orde Lama dan Orde Baru, Pemerintahan darurat ini seperti mau dihilangkan dalam sanubari sejarah, padahal apabila tidak ada PDRI maka bisa dikatakan Indonesia bisa lenyap dalam konstestasi politik dunia pada saat itu. (Dedi Arman, 2017)

Pertanyaannya adalah kenapa Orde lama dan Orde Baru seakan tidak menyisakan ruang atau tempat untuk PDRI dengan tokohnya adalah Syafruddin Prawiranegara, tentu jawabannya sudah jelas bahwa kedua presiden baik Soekarno dan Soeharto memandang PDRI mempunyai kesinambungan PRRI (Pemerintahan Revolusioner Republik Indonesia), dan ada beberapa tokoh PDRI yang terlibat dalam PRRI (Pemerintah Revolusioner Republik Indonesia), sekaligus mengangkat Syafruddin Prawiranegara menjadi Perdana Menteri dalam kabinet PRRI (Sriyanto, 2019), padahal PRRI adalah sebuah gerakan koreksi terhadap kekeliruan pemerintah pusat, gerakan memperjuangkan otonomi daerah, desentralisasi pemerintah, atau penghapusan peran PKI dalam kehidupan berbangsa dan bernegara (Lukman Hakim, 2008), dan mereka melihat PRRI adalah gerakan separatis.

Banyak yang beranggapan bahwa PRRI adalah Sebuah Gerakan separatis yang ingin memisahkan diri dari Indonesia tidak sepenuhnya benar namun tidak sepenuhnya salah, karena dia muncul akibat dari pemerintahan pusat sendiri karena tidak bijak dalam mengambil keputusan, apa lagi ditubuh pemerintah sendiri sudah banyak gembong-gembong PKI yang hadir didalamnya, hal ini di lihat

dan dialami oleh Sjafrudin Prawiranegara sendiri, dan kesenjangan pembangunan yang jomplang antara Pulau Jawa dengan pulau-pulau lainnya juga menimbulkan upaya revolusi-revolusi yang bersifat kedaerahan. (Verelladevanka Adryamarhanino, 2021) Sjafruddin menilai Bung Karno sudah menyimpang dari konstitusi. Sehingga mengakitnya, Sjafruddin sempat "dikarantina/Tahanan" secara politik oleh Soekarno. Baru pada tahun 1998, pemerintah Indonesia menghargai jasa-jasanya dan menganugerahi gelar pahlawan nasional (Floriberta Aning, 2005).

Lahirnya PDRI sebenarnya tidak jauh terlepas dari dominasi Belanda terhadap Indonesia maksudnya adalah adalah ketidakmauan Belanda untuk mengakui bahwa Indonesia telah merdeka seutuhnya, dan pada tanggal 18 Desember 1948 pada jam 23:30 melalui radio Wakil Tinggi Mahkota Kerajaan Belanda Louis Joseph Maria Beel yang menyatakan bahwa Pemerintah Belanda tidak mau terikat lagi dengan Perjanjian Renville (Wijaya et al., n.d.). sehingga Belanda melakukan agresi militernya di tanah Indonesia kemudian ini menjadi babak terakhir dari bangsa Belanda untuk menancapkan kukukukunya di Indonesia, walau agresi sangat singkat (1948-1948) namun itu semua menentukan kehidupan bangsa Indonesia selanjutnya (Alit et al., n.d.).

Perjanjian Renville merupakan suatu perjanjian antara Indonesia dan Belanda yang terjadi pada tanggal 8 Desember 1947 sampai Januari 1948 yang di adakan di atas kapal perang Amerika Serikat sebagai tempat netral USS Renville yang berlabuh di Tanjung Periuk Jakarta, perundingan ini sendiri dimediasi oleh Komisi Tiga Negara (KTN) atau Committee of Good Offices for Indonesia yang di dalamnya terdiri dari 3 negara besar yaitu Amerika Serikat, Australia dan Belgia, tujuan dari perjanjian ini untuk mencapai kesepakatan atas

konflik antara Indonesia dan Belanda (SAP, 2024).

Melalui perdebatan dan beradu argumen sengit antara kedua belah pihak yang berkonflik sejak tanggal 8 Desember 1947-17 Januari 1948 maka ada kesempatan damai keduanya dengan intinya:

1. Belanda tetap berdaulat diatas seluruh wilayah Indonesia sampai kedaulatan Indonesia diserahkan kepada Republik Indonesia Serikat (RIS) yang akan segera dibentuk.
2. Republik Indonesia Serikat mempunyai kedudukan yang sama/sejajar dengan negara Belanda dalam Perserikatan Belanda-Indonesia.
3. Republik Indonesia akan menjadi Negara bagian dari RIS
4. Sebelum RIS terbentuk Belanda dapat menyerahkan Kekuasaannya kepada Pemerintahan Federal Sementara.
5. Pasukan Republik Indonesia yang berada di kantong harus ditarik ke daerah Republik Indonesia (Reza Ade Christian, 2011).

Dalam perjanjian Renville ini Belanda hanya mengakui wilayah republik Indonesia hanyalah sebagian Jawa yaitu Yogyakarta, Sumatera Tengah dan Wilayah Aceh (Susanto Tirtoprodjo, 1966).



Foto 1 Foto Sumber ANRI

Dibawah dentuman suara Bom dan banyaknya penerjun payung Belanda,

situasi tersebut memaksa pemimpin Indonesia untuk memutuskan tinggal didalam kota sebelum ditangkap oleh Belanda, Soekarno sempat memanggil dan memerintah Mutahar kekamar pribadinya dan berkata “*aku memberikan tugas kepadamu dalam keadaan bagaimanapun, aku memerintakan kepadamu untuk menjaga bendera kita dengan nyawamu ini tidak boleh jatuh ketangan musuh di satu waktu, Insya Allah, engkau harus mengembalikannya kepadaku sendiri dan tidak kepada siapapun, kecuali orang yang mengantikanku. Andai kata engkau meninggal dalam upaya menyelamatkan bendera ini dan dia kemudian harus menyerahkannya ke tanganku sendiri sebagaimana engkau harus mengerjakannya*” (Zubir & Rismadona, 2014).

Dalam pandangan militer serangan yang dilakukan mendadak ini adalah kesuksesan besar bagi Belanda karena wilayah Jogjakarta dengan sekecap berhasil dilumpuhkan, namun dari pandang dunia Internasional serangan ini mendapat kecaman yang luar biasa, karena Belanda dengan sepihak memulai peperangan tanpa pengumuman perang, dan kemudian peperangan ini dimulai disaat masih berlangsungnya perjanjian/ perundingan di bawah KTN yang mewakili madat PBB (Reza Ade Christian, 2011), bahkan TB. Simatupang menyebutkan bahwa ini merupakan tindakan yang sangat gila yang dilakukan oleh Belanda terhadap Indonesia (Julius Pour, 2010).

Akibat dari Agresi Belanda II itu mengakibatkan lumpuhnya sementara pemerintahan Indonesia karena ditangkapnya kedua proklamator Indonesia, dengan cermat Soekarno dan Hatta mengirimkan telegram yang berbunyi “*kami, Presiden Republik Indonesia memberitakan bahwa pada hari Minggu tanggal 19 Desember 1948 jam 6 pagi Belanda setelah memulai serangannya atas ibu kota Jogjakarta, jika dalam keadaan*

pemerintah tidak dapat menjalankan kewajibannya, kami menugaskan kepada Mr. Sjafruddin Prawiranegara menteri kemakmuran RI membentuk pemerintahan darurat di Sumatera, namun telegram itu tidaklah sampai di Bukit Tinggi, namun dalam saat bersamaan Syafruddin Prawiranegara, telah mengambil inisiatif, karena menurutnya Indonesia tidak boleh tergantung kepada soekarno dan Hatta, maka dalam rapat dekat Ngarai Sianok, Bukit Tinggi pada tanggal 19 Desember 1948 diusulkan di bentuk PDRI dan Gubernur Sumatra pada saat itu Mr.T.M Hasan menyetujui usulan tersebut demi menyelamatkan NKRI ini (Dedi Arman, 2017).

Teks lengkap mandat Presiden Soekarno dan Mohd. Hatta

Mandat Presiden Kepada Mr. Sjafruddin Prawira Negara

Kami Presiden Rep. Indonesia memberitahukan, pada hari Minggu tgl. 19 Des. 1948, jam 6 pagi Belanda telah memulai serangannya atas ibu kota Jogjakarta. Jika dalam keadaan pemerintah tidak dapat menjalankan kewajibannya lagi, kami menugaskan kepada Mr. Sjafruddin Prawiranegara Menteri Kemakmuran Rep. Indonesia untuk membentuk Pemerintahan Rep. Indonesia Darurat di Sumatera.

Presiden: SUKARNO, Wakil Presiden, Mohd. Hatta. Jogjakarta, 19 Desember 1948

Teks lengkap mandat Presiden dari Menteri Luar Negeri H. Agus Salim kepada Dr. Sudarsono, L.N Palar dan Mr. Alexander Andries Maramis di New Delhi berbunyi Sebagai berikut:

Prof. Dr. Sudarsono-Palar-MR.A. A, New Delhi.

Kami Presiden Rep. Indonesia memberitahukan, pada hari Minggu tgl. 19 Desember 1948, jam 6 pagi Belanda telah memulai serangannya atas ibu kota Jogjakarta. Jika ikhtiar Sjafruddin

Prawiranegara untuk membentuk Pemerintahan Darurat di Sumatera tidak berhasil kepada saudara-saudara ditugaskan untuk membentuk exile Government Republik Indonesia di India. Harap dalam hal ini sehubungan dengan Sjafruddin di Sumatera. Jika hubungan tidak mungkin, harap diambil tindakan-tindakan seperlunya.

Menteri Luar Negeri: Agus Salim

Wakil Presiden: Mohd. Hatta

Jogjakarta, 19 Desember 1948 ('Suara Mesjid', 1979)

Sungguh disayangkan pada saat Agresi militer yang menjadi sasaran Belanda di Yogyakarta adalah semua stasiun radio dan semua alat komunikasi yang ada sehingga akibatnya radiogram itu tidak pernah sampai kepada alamat yang ditujukan (Moch. H. Kharismulloh Hilmatiar, 2015). dalam Arsip LN Palar, No.132, ANRI Alex dalam telegramnya menyebutkan bahwa Hatta sendiri menyatakan bahwa dalam statemennya bahwa PDRI Berkuasa dan bertanggung jawab penuh dan resmi menggantikan pemerintahan sebelumnya (MK+, 2022), berarti Sjafruddin Prawiranegara resmi menggantikan presiden secara sementara waktu.

Dalam laporan yang diungkapkan oleh Simatupang didalam buku laporannya dari Banaran yaitu "sebelum Republik Berusaha Mengadakan Front Bersama Dengan BFO, maka dikalangan Republik Sendiri tentulah terlebih dahulu harus diusahakan kebulatan pikiran pada tanggal 13 Juli 1949 malam, maka bertemulah "republik" yang akan mengadakan perundingan dengan Belanda di Jakarta dan Bangka pada satu pihak dengan "republik" yang telah menjalankan perang rakyat pada pihak lain dalam suatu cabinet istana, bung Hatta yang berbicara atas nama "republik" yang pertama menjelaskan bahwa dalam pandangan pemimpin yang berada di Bangka, PDRI berkuasa penuh kedalam sedangkan pemimpin-pemimpin di Bangka

hanya membantu PDRI itu untuk mengadakan kontak keluar dengan Republik, sedangkan Kontak dengan PDRI tidak dapat diadakan.



Foto 2 Sumber: ANRI. Foto personal P04-258.

Menurut catatan Taufik Abdullah, seminimalnya ada 3 tindakan spontanitas yang diambil di saat awal Agresi II, terkhusus dalam soal pentingnya diambil keputusan tentang pemerintahan darurat, hal ini dilandasi bahwa adanya kesadaran bahwa tidak bolehnya vakum suatu pemerintahan yang sah, inisiatif ini didorong akan adanya kabar yang diterima dari siaran radio bahwa Yogyakarta telah berhasil diduduki oleh Belanda (Dr Nopriansyah, n.d.).

Pendekatan politik dalam kajian sejarah PDRI sangat penting untuk memahami kebijakan-kebijakan strategis yang diambil oleh pemerintah darurat dalam merespons agresi militer Belanda II pada tahun 1948. Pembentukan PDRI oleh Syafruddin Prawiranegara bertepatan pada tanggal 22 Desember 1948 di Desa Halaban Kabupaten Lima Puluh Kota Sumatera Barat ('Suara Mesjid', 1979), merupakan tindakan politik luar biasa yang bertujuan menjaga eksistensi negara Republik Indonesia di tengah kekosongan pemerintahan pusat

akibat penangkapan Presiden Soekarno dan Wakil Presiden Mohammad Hatta oleh Belanda. Kebijakan ini memperlihatkan respons cepat dan efektif dari elit politik daerah yang memahami pentingnya kesinambungan pemerintahan untuk keabsahan Republik di mata rakyat dan komunitas internasional (Ahmad Syafii Maarif, 1985).

Selain menjaga kontinuitas pemerintahan, kebijakan PDRI juga memiliki dampak signifikan terhadap dinamika politik nasional. Dengan mengoordinasikan perlawanan dari wilayah Sumatera dan mendukung gerakan militer serta diplomatik, PDRI memperkuat semangat nasionalisme dan konsolidasi kekuatan antikolonial. PDRI menjadi simbol resistensi terhadap kolonialisme serta memperlihatkan kemampuan daerah dalam mengambil peran strategis dalam kancah nasional. Hal ini menandai awal dari pola hubungan pusat dan daerah yang dinamis dan menginspirasi desentralisasi kekuasaan pada masa-masa setelah kemerdekaan (Heri Priyatmoko, 2009).



Foto 3 Syafruddin Prawiranegara (baju Hitam) bersama Pemimpin PDRI saat akan bertolak ke Yogyakarta (A.H Nasution, 1979)

Di tingkat internasional, keberadaan PDRI memperkuat posisi Indonesia dalam diplomasi luar negeri, khususnya dalam menarik simpati dan dukungan dari negara-negara dunia ketiga dan organisasi internasional seperti PBB. Fakta bahwa pemerintahan Indonesia tetap eksis melalui

PDRI menjadi bukti bahwa Republik Indonesia bukan identitas yang hilang, sebagaimana diklaim Belanda. Keberadaan PDRI memberikan dasar legitimasi yang kuat dalam perundingan-perundingan internasional, termasuk Konferensi Meja Bundar tahun 1949, yang akhirnya mengakui kedaulatan Indonesia secara penuh (George, 2008).

Sebenarnya sejak awal tahun 1948 pimpinan militer yang di dalamnya ada A.H Nasution pada saat itu menjabat kepala Staf Operasi MBAP (Markas Besar Angkatan Perang) dengan panglima Besar Jenderal Sudirman mereka sudah berpikir jauh apa bila kedepan akan ada agresi militer dari Belanda, atas instruksi/perintah jenderal Sudirman, kolonel A.H. Nasution mengajukan konsep tentang susunan pertahanan dan ketentraman, yang konsep tersebut sudah dipersiapkan dan digali ide-idenya dari pengalaman peperangan kemerdekaan agresi pertama tahun 1947, ada dua yang paling utama yaitu perlunya organisasi territorial yang didalamnya adanya masyarakat-masyarakat desa dan pembagian pasukan menjadi 2 kelompok besar dengan tugasnya masing-masing (Alit et al., n.d.).

Pemerintahan Darurat yang telah di bentuk Syafruddin Prawiranegara bukan sebagai alat separatisme tapi lebih kepada alat pertahanan negara akan eksistensinya negara Indonesia supaya tetap merdeka dan berdaulat atas negerinya, sehingga Sartono Kartodidjo mengungkapkan bahwa PDRI yaitu soal *to be or not to be* yang berarti bahwa tidak ada Indonesia tanpa eksistensi PDRI (Djaja Wahjudi, 2008).

Pada saat Belanda melakukan penyerangan ke Yogyakarta Syafruddin Prawiranegara sedang berada di Bukit Tinggi, Sumatera. Bahkan beliau tidak tau akan ada mandat dari presiden karena di akibatkan putusnya komunikasi antara kedua pulau Jawa dan Sumatera tersebut (Ajip Rosidi, 2011). Setelah diketahui secara pasti bahwa presiden serta pimpinan

pemerintah dan lain ditawan, maka bersama pemimpin sipil dan militer, Syafruddin Prawiranegara membentuk pemerintahan darurat (Moch. H. Kharismulloh Hilmatiar, 2015). Lalu kabinet PDRI di susun di Halaban pada hari Rabu pukul 04.30 pagi pada tanggal 22 Desember 1948, yang kemudian hari disebut dengan "Kabinet Perang" (T.B Simatupang, 1961).

Berkas ketua PDRI

(Syafruddin Prawiranegara)

Tindakan disampaikan kepada:

1. Presiden Republik Indonesia
2. Wakil presiden R.I
3. Anggota-anggota DPR/MPR d.p. Ketuanya
4. Pers dan Mass-Media

Kabinet Darurat

19 Desember 1948-13 Juli 1949

1. Ketua, merangkap Pertahanan, Penerangan dan mewakili urusan Luar Negeri: Syafruddin Prawiranegara
2. Menteri Luar Negeri: Mr. A.A. Maramis
3. Pengajaran, Pendidikan dan Kebudayaan, Mewakili Urusan dalam negeri dan agama: Mr. Teuku Mohd. Hasan
4. Keuangan mewakili Kehakiman: Mr. Lukman Hakim
5. Pemburuan dan sosial, Pembangunan dan pemuda serta keamanan: Mr. Sutan Rasjid
6. Pek. Umum dan mewakili kesehatan: Ir. Sitompul
7. Perhubungan mewakili Kemakmuran: Ir. Indratjaja ('Suara Mesjid', 1979)

Pada tanggal 16 Mei 1949 oleh pemerintah Darurat dibentuklah komisariat PDRI di Jawa yang terdiri dari:

1. Menteri kehakiman: Mr. Susanto Tirtoprodjo
2. Menteri PMR: I.J Kasimo
3. Menteri agama: K.H. Masykur

4. Untuk urusan Dalam Negeri R.P. Suroso

Sedangkan pejabat di bidang militer:

1. Panglima Besar Angkatan Perang RI: Letnan Jend. Sudirman
2. Panglima Tentara dan Teritorium Jawa: Kol. Abd Haris Nasution
3. Panglima Tentara dan Teritorium Sumatera: Kol. R. Hdyt Artaatmadja
4. Kepala Staf Angkatan Laut: Kol. Moh. Nazir
5. Kepala Staf Angkatan Udara: Kom Udara Hubert Suyono
6. Kepala kepolisian Negara: Kombes Polisi Umar Said (Zubir & Rismadona, 2014).

Dari fakta diatas menurut sejarawan Ahmad Mansurya Negara, Syafruddin Prawiranegara adalah orang yang sangat loyal terhadap presiden Soekarno dan bersama wakilnya walaupun keduanya masih dalam masa pembuangan, Syafruddin Prawiranegara tidak menyalahkan Amanah dalam pembentukan pemerintah Darurat Indonesia karena dia tidak mengangkat dirinya menjadi presiden PDRI, melainkan Sebagai Ketua PDRI, dan Amanah tersebut tetap dijaga Hingga 13 Juli 1949 beliau menyerahkan kemabali mandatnya kepada wakil Presiden Mohammad Hatta pada saat merangka sebagai perdana Menteri, sehingga jika ada pernyataan presiden ke 2 Republik Indonesia adalah Syafruddin Prawiranegara, perlu dikoreksi Kembali (Ahmad Mansur Suryanegara, 2010). Dalam buku sekitar perang kemerdekaan Indonesia menurut Adul Haris Nasution menyebutkan bahwa, Syafruddin Prawiranegara adalah seorang perdana Menteri Geriliya (A.H Nasution, 1979).

Dalam surat Kabar "Pelita" pertanah dimuat wawancara dengan Syafruddin Prawiranegara, beliau mengkonfirmasi penggunaan istilah ketua dalam kabinet darurat tersebut:

“mengapa saya tidak menamakan Presiden Republik Indonesia, tetapi Ketua pemerintah Darurat Republik Indonesia.? Yang demikian itu disebabkan karena saya belum mengetahui adanya mandat Presiden Soekarno, dan didorong oleh rasa keprihatinan dan kerendahan hati....

Tetapi andai kata saya tau tentang adanya mandat tadi, niscaya saya akan menggunakan istilah “Presiden Republik Indonesia” untuk Menunjukkan pangkat dan jabatan saya.....dengan istilah ketua PDRI sebenarnya saya adalah Presiden Republik Indonesia dengan segala Kekuasaan yang di berikan oleh UUD 1945 dan diperkuat oleh mandat Presiden Soekarno dan wakil Presiden Hatta, yang pada waktu itu tidak dapat bertindak sebagai Presiden dan wakil Presiden” (Ajip Rosidi, 2011).

Sebagai sosok utama dalam PDRI, Syafruddin Prawiranegara adalah sosok yang paling berjasa dalam mengamankan negeri ini, PDRI terus berkampanye dan mencari dukungan di mata internasional untuk kemerdekaan Indonesia, upaya ini membuahkan hasil, Belanda dengan berat hati akhirnya berunding dan di bebaskannya Kembali ke dua proklamator Indonesia dan berhasil kembali Ke Jogjakarta, dan berkat Syafruddin Prawiranegara juga pemerintah RI tetap eksis di Konferensi Meja Bundar (KBM), dan dalam KBM ini pertama sekali Indonesia mendapatkan pengakuan resminya (Floriberta Aning, 2005).

Penutup

PDRI berdiri sebagai simbol keberlangsungan negara, menjaga legitimasi republik, dan memastikan kelangsungan diplomasi luar negeri. Jika tidak ada PDRI, maka eksistensi republik Indonesia bisa saja tidak diakui oleh dunia internasional.

Syafruddin merupakan figur yang religius sekaligus rasional, mampu menjembatani antara nilai-nilai keislaman dan kepentingan negara. Sebagai anggota masyumi, ia menempatkan kepentingan republik di atas partai atau golongan. Kepemimpinannya dalam PDRI menegaskan bahwa negara tetap hidup, walau pusat pemerintahan direbut musuh.

Ia mengatur koordinasi perlawanan gerilya, menjaga komunikasi dengan para diplomat Indonesia di luar negeri, serta mempertahankan struktur pemerintahan dalam bentuk darurat. Pemerintahan PDRI berjalan selama kurang lebih tujuh bulan hingga Soekarno dan Hatta dibebaskan dan pemerintahan pusat kembali aktif.

Dalam lanskap pemikiran politik Indonesia pascakemerdekaan, Syafruddin termasuk tokoh yang merepresentasikan islam modern yang terbuka dan berpandangan luas. Ia memilih Masyumi karena kedekatannya dengan nilai-nilai islam yang diwariskan orang tuanya, meskipun ia juga memiliki pandangan yang simpatik terhadap sosialisme religius.

PDRI adalah fondasi penting yang menyelamatkan republik Indonesia dari ancaman pembubaran oleh kekuatan kolonial. Syafruddin Prawiranegara bukan hanya tokoh alternatif, tetapi pahlawan konstitusional yang perannya setara dengan para proklamator.

Kajian ini menegaskan pentingnya penulisan sejarah nasional yang lebih inklusif, adil, dan komprehensif, dengan mengangkat peran tokoh-tokoh kunci yang terlupakan, seperti Syafruddin Prawiranegara. Dengan demikian, generasi mendatang dapat memahami bahwa kemerdekaan Indonesia adalah hasil dari kontribusi kolektif berbagai tokoh dari berbagai latar belakang ideologi dan keyakinan.

Referensi

A.H Nasution. (1979). *Sekitar Perang Kemerdekaan Indonesia*. Disjarah-Ad

dan penerbit Angkasa Bandung.

Press.

- Ahmad Mansur Suryanegara. (2010). *Api Sejarah 2*. Salamadani Pustaka Semesta.
- Ahmad Syafii Maarif. (1985). *Islam dan Masalah Kenegaraan: Studi tentang Percaturan dalam Konstituante*. LP3ES.
- Ajip Rosidi. (2011). *Syafruddin Prawiranegara Lebih Takut Kepada Allah SWT*. Pustaka Jaya.
- Akmal Nasery Basral. (2011). *Presiden Prawiranegara, Kisah 207 Hari Syafruddin Prawiranegara Memimpin Indonesia*. Mizan.
- Alit, D. M. et al. (n.d.). *Pemerintahan Darurat Republik Indonesia (PDRI) Dalam Gejolak Revolusi Fisik Di Indonesia*. Universitas PGRI Mahadewa Indonesia.
- Dedi Arman. (2017). *Mengenang PDRI dan Hari Bela Negara*. <https://Kebudayaan.Kemdikbud.Go.Id/>.
- Dian Aries Mujiburohman. (2013). *Impeachment Presiden Mekanisme dan Alasan Pemberhentian Presiden menurut UUD 1945*. KotakBuku.
- Djaja Wahjudi. (2008). *PDRI*. Cempaka Putih.
- Dr Nopriansyah. (n.d.). *Jejak Perjalanan Sejarah Perjuangan PDRI Priode Desember 1948-Maret 1949*.
- Floriberta Aning. (2005). *100 Tokoh yang Mengubah Indonesia: Biografi Singkat Seratus Tokoh Paling Berpengaruh Dalam Sejarah Indonesia di Abad 20* (Bernard Siagian (Ed.)). Penerbit Narasi.
- George, M. W. (2008). *The Elements of Library Research*. Princeton University Press.
- George McT. Kahin. (2016). In Memoriam: Syafruddin Prawiranegara (1911-1989). *Southeast Asia Program Publications at Cornell University*.
- Heri Priyatmoko. (2009). *PDRI dalam Lintasan Sejarah Indonesia*. Ombak.
- Julius Pour. (2010). *Doostoot Naar Djokja : Pertikaian Pemimpin Sipil-Militer*. Kompas.
- Lukman Hakim. (2008). *100 Tahun Mohammad Natsir*. Republika.
- Mestika Zed. (2004). *Metode Penelitian Kepustakaan*. Yayasan Obor Indonesia.
- MK+. (2022). A.A MARAMIS SANG INISIATOR OEANG REPUBLIK INDONESIA. *KEMENTRIAN KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA, XIV(200)*.
- Moch. H. Kharismulloh Hilmatiar. (2015). *Pembentukan Pemerintahan Darurat Republik Indonesia Tahun 1948-1949 Dalam Perspektif Fiqh Siyasah Dan Hukum Tata Negara*. *Al-Mazahib*, 3(1).
- MPR RI. (2020). *Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia* (Cetakan 19). Sekretariat jenderal MPR RI.
- Muhammad Mansur. (2017). *Pandangan Syafruddin Prawiranegara Terhadap Bunga Bank (Tinjauan Tafsir Kontekstual Indonesia Tentang Riba)*. *NUN*, 3(1).
- Mustafa, H., & M. Anwar Syi'aruddin. (2020). *Creative Understanding Dalam Progressivisme Pemikiran Islam Politik Syafruddin Prawiranegara (1911-1989): Sebuah Pendekatan Komunikasi*. *POLITEA : Jurnal Politik Islam*, 3(1).
- Nazir, M. (2005). *Metode Penelitian*. Ghalia

Indonesia.

Dampaknya. *Kompas.Com*.

Puspasari Setyaningrum. (2023, June). Mengenal Mr. Assaat, Datuk Mudo Asal yang Pernah Menjadi Pj Presiden Republik Indonesia. *Regional.Kompas.Com*.

Wijaya, M. I. et al. (n.d.). *Peran Sjafruddin Prawiranegara Dalam Mempertahankan Kedaulatan NKRI Dari Agresi Militer Belanda II di Riau, Tahun 1948-1949*. Universitas Riau.

Reza Ade Christian. (2011). *Agresi Militer Belanda I dan II (Priode 1947-1949) Dalam Sudut Pandang Hukum Internasional*. Universitas Indonesia.

William Ciputra. (2022). Biografi Syafruddin Prawiranegara, Pahlawan Nasional Asal Banten Berjuluk Presiden yang Terlupakan. *Kompas.Com*.

SAP. (2024). Pameran BINAR Bulan Januari Angkat Tema Penandatanganan Perjanjian Renville. In *ANRI (Arsip Nasional Indonesia)*.

Zubir, Z., & Rismadona. (2014). *Sumpur Kudus Dalam Perjalanan Sejarah Minangkabau Tahun 1942-1965*. Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan Direktorat Jenderal Kebudayaan Balai Pelestarian Nilai Budaya (BPNB) Padang.

Siagian, M. S. et al. (2022). *Kepimpinan Presiden Di Indonesia* (G. E. Prasetyo (Ed.)). Al Maksu Langkat Press.

Sriyanto. (2019). Peranan Dakwah Mr. Sjafruddin Prawiranegara dalam Menyelamatkan Republik. *Jurnal Ilmu Dakwah UIN Walisonggo*, 39(1), 45-56.

Suara Mesjid. (1979). *Yayasan Al-Hilal*.

Sungkar Pratama. (2019). *Peranan Sjafruddin Prawiranegara Daam Pemerintah Indonesia Tahun 1945-1949*. Universitas Jember.

Susanto Tirtoprodjo. (1966). *Sedjarah Revolusi Nasional Indonesia, Sedjarah Revolusi Nasional Indonesia*. PT. Pembangunan.

T.B Simatupang. (1961). *Laporan Dari Banaran*. PT. Pembangunan.

Tempo. (2023, January). 2 Presiden Indonesia yang Kerap Dilupakan: Sjafruddin Prawiranegara dan Mr Assaat. *Tempo.Co*.

Verelladevanka Adryamarhanino. (2021). PRRI: Latar Belakang, Tuntutan, Anggota, Penumpasan, dan